



# LAPORAN KINERJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

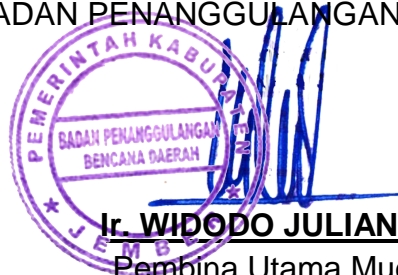
Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Januari 29 Februari 2023

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**Ir. WIDODO JULIANTO**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19660721 199203 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. LATAR BELAKANG .....	
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	
A. RENCANA STRATEGIS .....	
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	
C. PERJANJIAN KINERJA .....	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2023 .....	
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	
BAB IV. PENUTUP. ....	
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

### **Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah**

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun, mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Baik,

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.695.868.214 merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 16.573.148.514 dan Belanja Modal sebesar Rp 3.122.719.700

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.248.676.945 atau 77,42% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja, Kendala atau

hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Kegiatan pada BPBD akan lebih optimal setelah perubahan APBD dilakukan, mengingat banyak kegiatan yang perlu disempurnakan;
2. Jika terjadi efisiensi segera di tindak lanjuti dengan penggeseran anggaran pada kegiatan-kegiatan lainnya;

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Kegiatan-kegiatan pada BPBD Banyak terlaksana, akan tetapi anggaran untuk honorarium dan uang lembur tidak dapat diserap dengan maksimal dikarenakan pegawai telah mendapatkan TPP
2. roses Perencanaan atas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait Target kinerja dan Anggaran dapat diadaptasi untuk perencanaan pada tahun berikutnya dan Perencanaan atas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dipersiapkan sebaik mungkin agar memudahkan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 sebagai berikut :

- (1) BPBD merupakan unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD mempunyai tugas :
  - a) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - c) menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

(4) BPBD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

(5) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pengarah; dan
- b. Pelaksana

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA BPBD**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **BPBD** terdiri dari 23 ASN dan 42 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **BPBD** :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN 22 Badan Penanggulangan**  
**Bencana Daerah Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kepala Badan	1	
2	Sekretaris Badan	1	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	
6	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian	1	
7	Perencana Ahli Muda	1	

8	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	4	
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	
10	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	
11	Pengadministrasi Kepegawaian	1	
12	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	
13	Pengadministrasi Umum	3	
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	
15	Pengemudi	2	
16	Pramu Kebersihan	2	1 Orang Tmt Pensiun 1 Juli 2023
<b>Jumlah</b>		23	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN 19 Badan Penanggulangan**  
**Bencana Daerah Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tingkat I	III/d	6
2	Penata	III/c	2
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
4	Penata Muda	III/a	2
5	Pengatur Tingkat I	II/d	5
6	Pengatur	II/c	1
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
8	Pengatur Muda	II/a	1
9	Juru Tingkat I	I/d	2
10	Juru	I/c	
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	
	<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN 65**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Jember**  
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	3	ASN
2	SLTP	1	ASN
3	SMA/STM	6	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	8	ASN
6	S2	4	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	2	Non ASN
9	SMA/STM	20	Non ASN
10	D3	4	Non ASN
11	S1	15	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	

#### **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** yaitu:

1. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan;
2. Sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana yang kurang memadai;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cepat, tanggap dan profesional dalam penanggulangan bencana

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 6 dan tujuan ke 1 yaitu :

- 1) Misi ke- : 6 (enam) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
- 1Tujuan ke- : 1 (satu) Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan.

Sasaran Strategis Kabupaten :

1. Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** sebagaimana termuat didalam rencana Strategis **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 :Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah

Indikator Tujuan :Indeks Resiko Bencana

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00
		Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%				
			Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%				
<b>Setelah Perubahan</b>									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)			0,6	0,6	0,6	0,6

Sumber data : tabel 4.1 pada Perubahan Rencana Strategis **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** tahun 2021-2026

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**

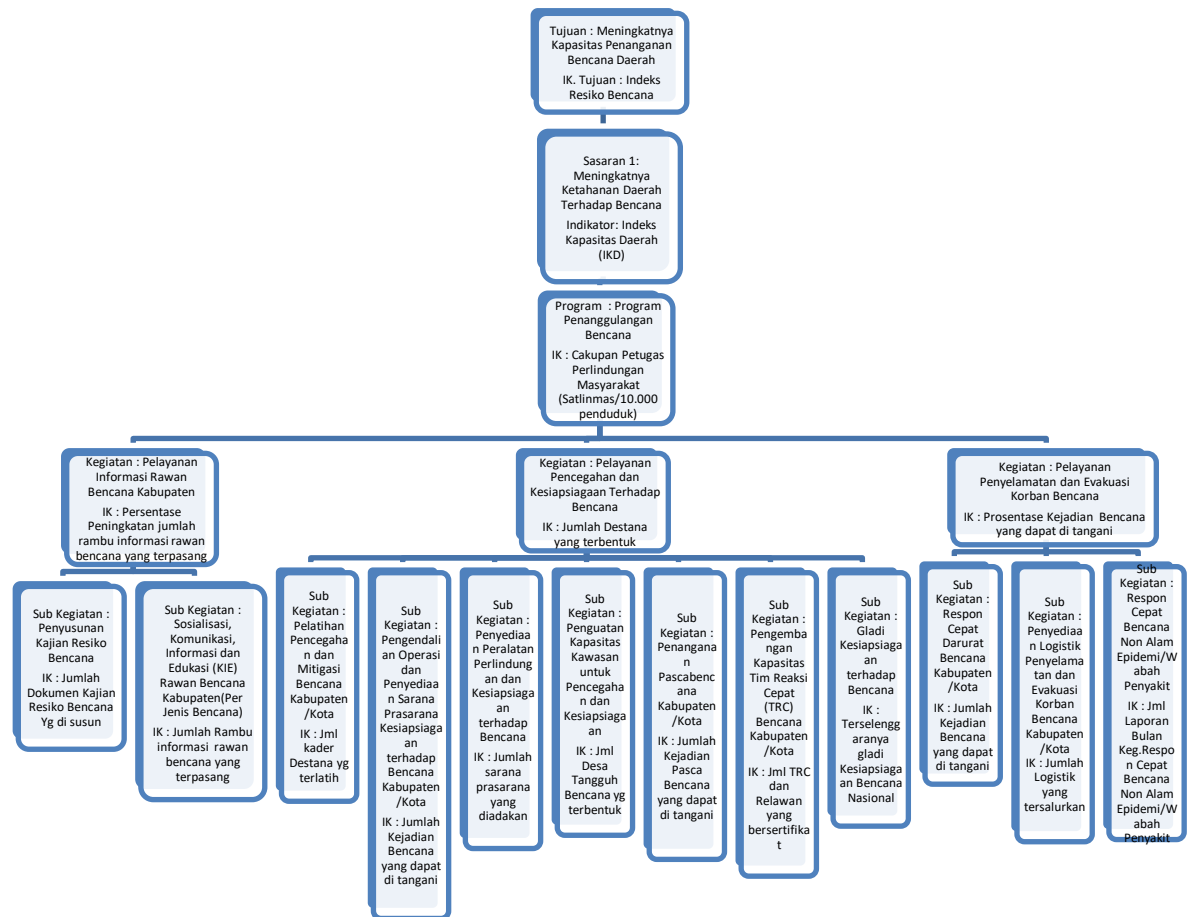
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah

sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 065/3130/416/2023 Tahun 2023;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	<p><b>Formulasi :</b> 71 indikator pemenuhan indeks prioritas harus terpenuhi.</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah .</li> <li>Pedoman penghitungan IKD: 71 indikator termasuk kedalam penghitungan 7 indeks prioritas</li> <li>IKD merupakan hasil penilaian BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan</li> </ol>	BPBD	BPBD
		Indeks Resiko Bencana	<p><b>Formulasi :</b> <math display="block">\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}</math></p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi Hazard : indeks bahaya (ancaman) pada suatu daerah</li> <li>Definisi Vulnerability :Kerentanan yang berada di suatu daerah</li> <li>Pedoman penghitungan IRB : IRB berpedoman pada jumlah bencana pada suatu daerah dan upaya kapasitas daerah untuk menanganinya</li> <li>IRB merupakan indeks Hasil Rilis Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK</li> <li>Merupakan kategori indikator progres negative, dimana semakin rendah nilai indeks semakin tinggi % capaian</li> </ol>	BPBD	BNPB

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 tahun 2021-2026 :

<b>NO (1)</b>	<b>SASARAN STRATEGIS (2)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (3)</b>	<b>TARGET (4)</b>
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,6
		Indeks Resiko Bencana	157.0

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung dengan anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana tahun 2023 sebesar 19.695.868.214 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah)

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	indeks kapasitas Daerah ( IKD )	0,6	0,55	91,6 %

			Indeks Risiko Bencana	157,0	148,78	105%
--	--	--	-----------------------	-------	--------	------

*Sumber Data: Data IKD BPBD Kab Jember: Data IRB dari Inarisk BNPB tahun 2023*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (2) dua indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah rata rata mencapai 94,76 % dan masuk dalam kategori Sangat memuaskan Dengan demikian maka secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2022	2023	2022	2023
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	indeks kapasitas Daerah ( IKD )	0,6	0,6	0,55	0,55
	Indeks Risiko Bencana	157.50	157.00	143.93	148.78

*Sumber Data: Data IKD BPBD Kab Jember: Data IRB dari Inarisk BNPB th. 2023 dan 2022*

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2023	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	indeks kapasitas Daerah ( IKD )	0,6	0,55	91,6 %
		Indeks Risiko Bencana	157.00	148.78	100 %

*Sumber Data: Data IKD BPBD Kab Jember: Data IRB dari Inarisk BNPB th. 2023*

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	indeks kapasitas Daerah ( IKD )	0,55		
		Indeks Risiko Bencana	148.78	148.78	Realisasi muncul dalam aplikasi BNPB Inarisk.

*Sumber Data: - Indikator 2 : Hasil Realis Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Capaian dan Realisasi Sasasran dapat di kategorikan memuaskan dikarenakan berdasarkan tabel 3.1 s/d 3.4 pada tahun sebelum nya hingga tahun 2023 realisasi kurang lebih masih dapat dipertahankan walaupun di tahun 2023 ada kenaikan realisasi di indeks resiko bencana kabupaten jember dibanding

tahun 2022, dikarenakan masih kurang optimal nya upaya mitigasi mitigasi Bencana di Kabupaten Jember.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana								
Indikator 1. indeks kapasitas Daerah (IKD)	91.6%	✓						
Indicator 2. Indeks Risiko Bencana	105%	✓						
Rata rata capaian	98,3%	✓						

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kategori Sangat Memuaskan;

**Sasaran Strategis** : Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 98,3% , dengan 1 indikator belum dapat mencapai target

capaian 100% seperti yang di tetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih belum memiliki Peraturan Daerah ( PERDA ) yang sah, karena pentingnya Perda termasuk dalam 71 indikator Penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Solusi perbaikan dalam permasalahan ini adalah :
  - a. Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan mengkoordinasikan upaya upaya percepatan penetapannya agar dapat memenuhi penilaian 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah.



### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**


Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 didukung 2 Program, 10 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :


**Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung  
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
tahun 2023**



Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program :Program Penanggulangan Bencana			
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			
	Input : Dana / Anggaran Rp. 662.597.400	Rp. 1.581.726.900	Rp. 583.900000	36,9%
	Output : Jumlah rambu bencana sesuai dengan jenis bencana yang ada di kawasan rawan.	500	500	100%

	<p>Outcome : terpasangnya rambu bencana sesuai dengan jenis bencana yang ada di kawasan rawan.</p> 			
2	Program : Penanggulangan Bencana			
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
	Input : Dana / Anggaran Rp. 1.111.206.900			
	Output : warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp. 1.069.006.900	Rp. 1.003.661.893	93,8 %
	<p>Outcome: Warga negara dan aparatur mengikuti kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> 	300 orang	300 orang	100%

				
3	Program : Penanggulangan Bencana	Rp. 663.155.700	Rp. 386.267.500	58,2.%
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
	Input : Dana / Anggaran Rp. 545.950.800			
	Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana			
	Outcome: Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana sebagai upaya peningkatan kapasitas	2 Kawasan	2 Kawasan	100%
	  			
4	Program : Penanggulangan Bencana	Rp. 404.000.000	Rp. 188.500.000	46,6%
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kontinjensi			
	Input : Dana / Anggaran Rp. 190.000.000			
	Output : Jumlah Dokumen Rencana			

	Kontinjensi yang disahkan			
	Outcome: Dokumen Rencana Kontinjensi yang disahkan	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	  			
5	Program : Penanggulangan Bencana			
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Sub Kegiatan: Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Input : Dana/ Anggaran Rp. 788.700.000			
	Output : Jumlah Aparatur dan Warga Negara mengikuti Apel dan simulasi untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Rp. 1.687.860.000  750 orang	Rp. 567.518.000  750 orang	33,6 %  100%
	Outcome: Aparatur dan Warga Negara mengikuti Apel dan simulasi untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional			

				
6	Program : Penanggulangan Bencana			
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			
	Input : Dana / Anggaran Rp. 35.000.000			
	Output : Jumlah Keluarga Tangguh Bencana	Rp. 200.000.000	Rp. 31.468.500	15,7%
	Outcome: Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana kepada Masyarakat 	300 keluarga	300 keluarga	100%





				
7.	Program :PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
	Sub Kegiatan :Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 5.310.458.000	Rp. 1.702.276.000	32%
	Input : Dana/Anggaran Rp. 2.134.698.000	150 Dokumen	147 Dokumen	98 %
	Output : Pemberian Bantuan stimulan kepada warga terdampak bencana.	150 Dokumen	74 Pengiriman bantuan material terhadap korban bencana	49%
	<p>Outcome : Warga terdampak bencana mendapatkan bantuan material untuk pemulihan perbaikan rumah pasca bencana.</p>   			

Foto (1-3 foto pelaksanaan sub kegiatan) dan Penjelasan Sub Kegiatan

#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	98,3%	77,42%	Efisien

Sumberdaya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 63 orang dengan rincian 6 pejabat struktural, 10 pelaksana, 5 fungsional, dan 42 Non ASN.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat didukung anggaran sebesar **Rp. 19.695.868.214,-** dan terserap sebesar **Rp. 15.248.676.945,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rata- rata capaian **77,42%**

#### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.19.695.868.214 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 16.573.148.514
2. Belanja Modal sebesar Rp 3.122.719.700

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 2 program dan 10 kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.454.338.100	3.339.697.114	74,9%
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.668.000	17.810.000	25,2%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.972.000	908.000	2,3 %
	Sub Kegiatan: koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.320.000	6.352.000	51,5%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.505.500	8.508.000	80,9%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.150.500	0	0%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.720.000	2.042.000	43,4%
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.063.800	9.644.000	60%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	12.169.800	7.974.000	65,5%

	Tahun SKPD			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.894.000	1.670.000	42,8%
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.131.000	214.087.600	70,3%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	271.971.000	214.087.600	78,7%
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.160.000	0	0%
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.889.600	680.920.436	68,8%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.057.000	22.057.000	100%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.722.100	89.153.100	78,4%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.436.000	53.963.700	51,6%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.049.500	217.555.000	94,1%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.221.000	7.055.000	43,4%
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.404.000	291.136.636	57,9%
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.723.298.000	1.408.520.483	81,7%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	3.900.000	92,8%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.828.000	122.077.179	58,7%
	Sub Kegiatan:	1.511.270.000	1.282.543.304	84,8%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.350.287.700	1.008.714.595	74,7%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.025.200	70.715.062	71,4%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.106.181.500	825.795.033	74,6%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.081.000	22.204.500	40,3%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	90.000.000	100%
	<b>Program :</b> PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.060.117.976	5.909.057.917	83,6%
1	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	24.000.000	15.500.000	64,5%
	Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	24.000.000	15.500.000	64,5%
2	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.387.169.700	2.774.746.893	81,9%
	Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.111.206.900	1.003.661.893	90,3%
	Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	243.307.000	152.700.000	62,7%
	Sub Kegiatan:	545.950.800	386.267.500	70,7%

	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
	Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	473.005.000	444.631.000	94%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kontijensi	190.000.000	188.500.000	99,2%
	Sub Kegiatan: Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	788.700.000	567.518.000	71,9%
	Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	35.000.000	31.468.500	89,9%
3	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.522.876.876	1.425.060.024	93,5%
	Sub Kegiatan: Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	403.738.352	380.957.500	94,3%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.119.138.524	1.044.102.524	93,2%
4	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.126.071.400	1.693.751.000	79,6%
	Sub Kegiatan: Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2.126.071.400	1.693.751.000	79,6%
	<b>JUMLAH</b>	19.695.868.214	15.248.676.945	77,42%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.248.676.945 dari total anggaran Rp. 19.695.868.214 atau 77,42%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 61,37 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 11.302.761.704 terealisasi sebesar Rp 9.050.345.700,- atau 80%. kenaikan ini disebabkan karena anggaran tahun 2023 lebih tinggi daripada anggaran tahun 2022 dengan selisih perbedaan anggaran sebesar Rp. 8.393.106.510.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 indikator sasaran sebanyak 1 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, 1 indikator dalam kategori baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp15.248.676.945 (77,42%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

#### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jember.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Menyusun dan membentuk Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. Danau Toba NO. 16 ☎ (0331) 321111 JEMBER



**RENCANA AKSI TAHUN 2023**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Mitigasi bencana terhadap infrastruktur yg akan di bangun	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		Program Penanggulangan Bencana	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
		Semester I : 100		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Semester II : 100	
				<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>				
		Semester I : 100		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang	Semester II : 100	
		Semester I : 100		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Dokumen	Semester II : 100	

					Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
		Semester I : 100		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Semester II : 100	
		Semester I : 100		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	Semester II : 100	
		Semester I : 100		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Orang	Semester II : 100	
		Semester I : 100		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	Semester II : 100	
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				
		Semester I : 100		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	Semester II : 100	
		Semester I : 100		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Semester II : 100	

				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana			
		Semester I : 100		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen		

Jember, 22 November 2023  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember



**Ir. WIDODO JULIANTO**  
NIP. 196607211992031007



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. Danau Toba NO. 16 ☎ (0331) 321111 JEMBER



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

### RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah jember	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan Merata serta berspektif kebencanaan	Indek Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.	Indeks Resiko Bencana

### RKT BPBD Kabupaten Jember

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,6	<u>Penanggulangan Bencana</u>	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (satlinmas/ 10,000 penduduk	100%				
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten						662.597.400
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 org	662.597.400

					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						3.387.169.700	
									Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300 org	1.111.206.900
									Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	24 dokumen	243.307.000
									Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	545.950.800
									Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 orang	473.005.000
									Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	190.000.000
									Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	750 orang	788.700.000
									Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	35.000.000

		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	% Penanganan bencana sesuai waktu tanggap	100%	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>						2.003.467.876
								Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 dokumen	403.738.352
								Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	1.599.729.524
					<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>						2.134.698.000
								Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	150 dokumen	2.134.698.000

Jember, 27 November 2023  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember



**If. WIDODO JULIANTO**  
NIP. 196607211992031007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. Danau Toba NO. 16 ☎ (0331) 321111 JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. WIDODO JULIANTO

Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

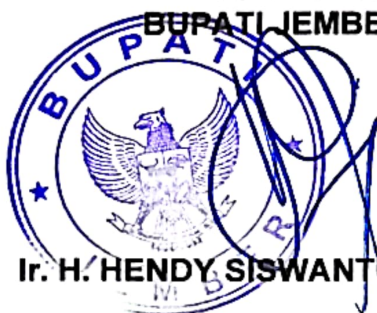
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**Ir. WIDODO JULIANTO**  
NIP. 196607211992031007

Pihak Kedua

**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

## PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,6

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	11.507.935.238	P – APBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp.	8.187.932.976	P – APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>19.695.868.214</b>	

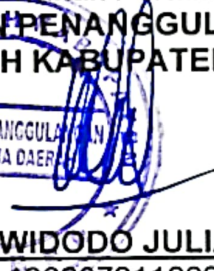
Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,

  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN JEMBER



  
Ir. WIDODO JULIANTO  
NIP. 196607211992031007



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau toba no 16 (0331) 321111 JEMBER 68121

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/3130 /416/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 21 November 2023

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**NIP. 196607211992031007**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Instansi** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- Tugas** : Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- Fungsi** : Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- Tujuan** : Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.
- Indikator Tujuan** : Indeks Risiko Bencana

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	BPBD	BNPB

1. **Hazard (bahaya)** dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam
2. **Vulnerability (kerentanan)** dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan
3. **Capacity (kapasitas)** dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.



**BNPB**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

*Piagam Penghargaan*

DIBERIKAN KEPADA

**BPBD KABUPATEN JEMBER**

SEBAGAI

**“PEMENANG TERFAVORIT KOMPETISI YEL-YEL BULAN PERINGATAN PRB 2022”**

BALIKPAPAN, 13 OKTOBER 2022

SEKRETARIS UTAMA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Dr. LILIK KURNIAWAN

